

ANALISIS USAHA TANI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT KOMODITAS CABAI BESAR DI KABUPATEN MALANG DENGAN MENGGUNAKAN POLICY ANALYSIS MATRIX (PAM)

Mokh. Rum

Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo

Abstract

This research has aimed to analyze government policy toward chili commodity. Farming location is selected by purposive method. Village Sukoanyar Wajak and Village Bocek Karangploso are chosen as farming location, because both of villages as production center of chili in Malang Regency. Deciding population is based on secondary data from Dinas Tanaman Pangan Malang regency by using total sampling method, meanwhile choosing sample of farmer is conducted by stratified random sampling, taking sampling for marketing activity is conducted by Rapid Marketing Appraisal method. Then, data is analyzed by Policy Analysis Matrix (PAM). The result of Policy Analysis Matrix (PAM) shows government protects input tradeable producer, showed by Nominal Protection Coefficient Input (NPCI) value > 1 . Government input transfer value to input tradeable factory are Rp307.703,56/acre. The government intervention causes chili market price is bigger than social price, it showed by Nominal Protection Coefficient Output (NPCO) value are 1,02%. Net transfer value of chili farming in Village Sukoanyar are Rp96.573,5/acre, meanwhile in Village Bocek are Rp29.773.669,36/acre. Subsidy Ratio to Producer value or SRP to chili farming in Malang Regency is zero or approximately zero, it means government policy doesn't influence directly to product change or chili farming.

Key word: Policy Analysis Matrix (PAM).

Pendahuluan

Cabai besar merupakan salah satu komoditas andalan Kabupaten Malang, hal tersebut didasarkan pertimbangan, karena secara agronomis dapat diproduksi di dataran tinggi, menengah, maupun dataran rendah. Disamping itu, cabai besar dapat diperdagangkan baik di pasar lokal maupun internasional. Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak merupakan daerah sentra pengembangan cabai besar di dataran menengah, karena 37% dari total lahan pertanian digunakan untuk budidaya cabai besar. Sedangkan, untuk wilayah dataran tinggi, budi daya cabai besar terbesar di Desa Bocek Kecamatan Karangploso, dimana 40% dari total lahan pertanian digunakan untuk budidaya cabai besar.

Pengembangan komoditas cabai besar di Kabupaten Malang masih ada campur tangan pemerintah, misalnya melalui kebijakan perundangangan terhadap input, kebijakan fasilitas, dan regulasi. Kebijakan pemerintah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan daya saing cabai besar. Cabai besar dipandang sebagai sumber

pertumbuhan baru untuk dikembangkan, karena mempunyai keterkaitan yang kuat baik ke sektor industri hulu pertanian (*up stream agriculture*) yang merupakan kegiatan usaha tani serta mampu meningkatkan nilai tambah produksi dan menyerap tenaga kerja melalui aktifitas pertanian skunder (*dwon srteam agriculture*).

Permasalahan yang dihadapi petani cabai besar di Kabupaten Malang adalah; naiknya harga sarana produksi seperti pupuk dan pestisida, fluktuasi harga cabai besar, masuknya komoditas cabai besar impor, dan persoalan lain terkait dengan aspek teknis budidaya cabai besar. Oleh karena itu penting dilakukan sebuah analisis usaha tani dan evaluasi tentang efektifitas kebijakan pemerintah terkait pengembangan komoditas cabai besar di Kabupaten Malang.

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapatan usaha tani cabai besar dan menganalisis kebijakan pemerintah terkait komoditas cabai besar di Kabupaten Malang.

Metode Penelitian

Metode Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Malang. Lokasi penelitian usahatani cabai besar terletak di kecamatan Wajak dan Karangploso dengan pertimbangan kedua kecamatan tersebut merupakan sentra produksi cabai besar di Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi usahatani dilakukan dengan cara sengaja (*purposive*). Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak dan Desa Bocek Kecamatan Karangploso dipilih sebagai lokasi usahatani, karena cabai besar di Kabupaten Malang sebagian besar berasal dari kedua desa tersebut.

Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel yang berkaitan dengan usahatani, menggunakan metode *stratified random sampling*, sedangkan sampel untuk aktifitas pemasaran dilakukan dengan metode *Rapid Marketing Appraisal (RMA)*. Responden

untuk aktivitas pemasaran terdiri dari: (a) lembaga pemasaran cabai besar, seperti pedagang pengumpul, pedagang grosir, pedagang besar dan pedagang pengecer, (b) lembaga pemasaran input, seperti PT. Pupuk Kaltim, PT. Pupuk Sriwijaya dan toko sarana produksi pertanian, (c) Dinas terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya (d). informan kunci.

Metode Analisis Data

Policy Analysis Matrix (PAM) digunakan untuk menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif, serta mengevaluasi efektifitas kebijakan pemerintah terhadap komoditas cabai besar. PAM yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep PAM Monke dan Pearson (1989).

Secara sistematis PAM disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Policy Analysis Matrix (PAM)

Keterangan	Penerimaan (output)	Biaya		Pendapatan
		Input Tradeable	Input Domestik	
Private prices	A	B	C	D
Social prices	E	F	G	H
Policy transfer	I	J	K	L

Sumber: Monke dan Pearson (1989).

Catatan : Private profits: $D=A-(B+C)$; Social profist: $H=E-(F+G)$;

Output transfer: $I=A-E$; Input transfer: $J=B-F$;

Faktor domestik transfer: $K=C-G$; Net policy transfer: $L=D-H$

Keterangan:

- A = penerimaan individu, yaitu produksi dikalikan harga pasar (Rp)
- B = input tradeable dikalikan dengan harga pasar (Rp)
- C = input faktor domestik dikalikan harga pasar (Rp)
- D = pendapatan individu $(A-(B+C))...$ (Rp)
- E = penerimaan sosial, yaitu produksi dikalikan dengan harga sosial (Rp)
- F = input tradable dikalikan harga pasar (Rp)
- G = input faktor domestik dikalikan harga sosial (Rp)
- H = pendapatan sosial $(E-(F+G))...$ (Rp)

- 1 Koefisien Proteksi Output Nominal = $\frac{A}{E}$ (NPCO), (%)
- 2 Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI), (%) = $\frac{B}{F}$
- 3 Koefisien Proteksi Efektif (EPC), (%) = $\frac{A-B}{E-F}$
- 4 Koefisien Keuntungan (PC), (%) = $\frac{D}{H}$
- 5 Transfer Output (OT), (Rp) = $A-E$
- 6 Transfer Input (IT), (Rp) = $B-F$
- 7 Transfer bersih (Rp) = $D-H = I-J-K$
- 8 Keuntungan prifat (Rp) = $A-B-C$
- 9 Keuntungan sosial (Rp) = $E-F-G$
- 10 Ratio Subsidi bagi Produsen (SRP) = $\frac{L}{E}$

Tabel PAM tersebut di atas, dapat digunakan untuk analisis:

1 Koefisien Proteksi Output Nominal = $\frac{A}{E}$

Kebijakan pemerintah terhadap input, output, produsen dan konsumen dapat dilihat pada nilai NPCO, NPCI, EPC, dan PC. Dimana $NPCO < 1$ menunjukkan dengan kebijakan

pemerintah menyebabkan harga privat lebih kecil dari harga sosial. NPCO = 0 berarti kebijakan pemerintah bersifat netral. NPCI > 1 menunjukkan pemerintah melakukan proteksi terhadap produsen input tradeable, sedangkan konsumen yang menggunakan input tersebut dirugikan dengan tingginya harga sarana produksi. EPC < 1 menunjukkan kebijakan insentif pemerintah terhadap usahatani cabai besar tidak efektif. Koefisien Keuntungan (PC) digunakan untuk melihat pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan produsen (petani) dan konsumen. PC > 1 menunjukkan keuntungan petani dengan adanya intervensi pemerintah lebih besar daripada keuntungan yang diterima konsumen. PC < 1 berarti

konsumen lebih diuntungkan, dan PC = 1 berarti keuntungannya sama.

Dampak kebijakan pemerintah terhadap biaya produksi dapat dilihat dari nilai SRP. Nilai SRP negatif, berarti adanya kebijakan pemerintah dapat mengurangi biaya produksi cabai besar, sebaliknya SRP positif berarti meningkatkan biaya produksi, dan SRP = 0 menunjukkan kebijakan pemerintah tidak berdampak pada biaya usahatani cabai besar.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil analisis PAM pada usahatani cabai besar di Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak dan Desa Bocek Karangploso Kabupaten Malang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Policy Analysis Matrix (PAM) pada Usaha Tani Cabai Besar di Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang

Uraian	Penerimaan (Rp)	Biaya (Rp)		Pendapatan (Rp)
		Input Tradeable	Faktor Domestik	
	(A)	(B)	(C)	(D)
Harga Pasar	47.581.333,31	4.174.794,46	14.817.721,02	28.588.817,83
	(E)	(F)	(G)	(H)
Harga Sosial	46.701.078,67	3.874.019,01	14.141.668,24	28.685.391,42
	(I)	(J)	(K)	(L)
Policy Transfer	880.254,64	300.775,45	676.052,78	-96.573,59
Indikator Analisis Model PAM			Rumus	Nilai
Keuntungan Individual (Rp)			A - (B+C)	28.588.817,83
Keuntungan Sosial (Rp)			E - (F+G)	28.685.391,42
Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO), (%)			A / E	1,02
Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI), (%)			B / F	1,08
Koefisien Proteksi Efektif (EPC), (%)			(A - B) / (E - F)	1,01
Koefisien Keuntungan (PC), (%)			D / H	1,00
Transfer Output (OT), (Rp)			A - E	880.254,64
Transfer Input (IT), (Rp)			B - F	300.775,45
Transfer bersih (Rp)			D - H	-96.573,59
Ratio Subsidi bagi Produsen (SRP)			L / E	0,00

Sumber: Data Primer Terolah

Sedangkan matrik analisis kebijakan pada usaha tani cabai besar di Desa Bocek Kecamatan Karangploso disajikan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Policy Analysis Matrix (PAM) pada Usaha Tani Cabai Besar di Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

Uraian	Penerimaan (Rp)	Biaya (Rp)		Pendapatan (Rp)
		Input Tradeable	Faktor Domestik	
	(A)	(B)	(C)	(D)
Harga Pasar	44.989.837,54	4.674.098,66	9.612.255,84	30.703.483,04
	(E)	(F)	(G)	(H)
Harga Sosial	44.157.525,54	4.366.395,10	10.017.461,08	29.773.669,36
	(I)	(J)	(K)	(L)
Policy Transfer	832.312,00	307.703,56	-405.205,24	929.813,68
Indikator Analisis Model PAM				
			Rumus	Nilai
Keuntungan Individual (Rp)			A - (B+C)	30.703.483,04
Keuntungan Sosial (Rp)			E - (F+G)	29.773.669,36
Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO), (%)			A / E	1,02
Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI), (%)			B / F	1,07
Koefisien Proteksi Efektif (EPC), (%)			(A - B) / (E - F)	1,01
Koefisien Keuntungan (PC), (%)			D / H	1,03
Transfer Output (OT), (Rp)			A - E	832.312,00
Transfer Input (IT), (Rp)			B - F	307.703,56
Transfer bersih (Rp)			D - H	929.813,68
Ratio Subsidi bagi Produsen (SRP)			L / E	0,02

Sumber: Data Primer Terolah

Matrik pada tabel 2 dan tabel 3 di atas dapat digunakan untuk menganalisis pendapatan usaha tani cabai besar di Kabupaten Malang dan efektifitas kebijakan pemerintah dalam pengembangan cabai besar.

Pendapatan individual merupakan selisih antara penerimaan privat dengan biaya usahatani. Tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan individual usahatani cabai besar di Desa Sukoanyar sebesar Rp28.588.817,83 per hektar sedangkan di Desa Bocek sebesar Rp30.703.483,04. Pendapatan sosial merupakan selisih antara penenmaan sosial (ekonomi) dengan biaya usahatani. Pendapatan sosial usahatani cabai besar di Desa Sukoanyar sebesar Rp28.685.391,42 per hektar dan di Desa Bocek sebesar Rp29.773.669,36 perhektar.

Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) digunakan untuk menilai kebijakan pemerintah terhadap komoditas cabai besar. NPCO usahatani cabai besar di Desa Sukoanyar dan Desa Bocek sebesar 1,02%. Nilai tersebut memiliki arti bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah terhadap output

menyebabkan harga aktual cabai besar lebih besar daripada harga sosial, dimana harga aktual sebesar Rp3.200,00 per kilogram sedangkan harga sosial sebesar Rp3.140,80 per kilogram. Kebijakan pemerintah terhadap output yaitu berupa kebijakan perdagangan, diantaranya dengan penentuan bea masuk dan pajak perdagangan. Bea masuk yang ditentukan oleh pemerintah pada aktifitas impor cabai besar yaitu sebesar 2,5% dan pajak perdagangan sebesar 5%.

Pada NPCO sebesar 1,02% terjadi transfer output kepada petani sebesar Rp880.254,67 per hektar pada usahatani cabai besar di Desa Sukoanyar dan Rp880.311,99 per hektar pada usahatani cabai besar di Desa Bocek. Transfer output menunjukkan besarnya perbedaan penerimaan usahatani yang benar-benar diterima oleh petani dengan penerimaan yang menggunakan harga sosialnya . Transfer output yang diterima pada usahatani cabai besar di Desa Bocek lebih besar daripada di Desa Sukoanyar. Hal ini berarti bahwa keuntungan kompetitif yang diperoleh petani secara individual di Desa Bocek lebih besar

dari pada keuntungan komparatif yang diperoleh masyarakat, sedangkan keuntungan kompetitif yang diperoleh petani secara individual di Desa Sukoanyar lebih kecil dari pada keuntungan komparatif yang diperoleh masyarakat.

Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI) dilakukan untuk menilai kebijakan pemerintah terhadap input. Nilai NPCI usahatani cabai besar di Desa Sukoanyar sebesar 1,08% sedangkan di Desa Bocek sebesar 1,07%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melakukan proteksi terhadap produsen *input tradeable* sedangkan petani sebagai konsumen yang menggunakan input tersebut dirugikan dengan tingginya harga sarana produksi. Nilai Transfer Input usahatani cabai besar di Desa Sukoanyar sebesar Rp300.775,45 dan di Desa Bocek sebesar Rp307.703,56 per hektar. Nilai tersebut merupakan nilai Transfer yang dinikmati perusahaan pupuk karena selisih harga pupuk yang dibayar oleh petani pada harga aktual dengan harga yang seharusnya dibayar oleh petani pada harga sosial. Komponen *input tradeable* yang memiliki harga privat lebih tinggi dari harga sosialnya yaitu: pupuk Urea, ZA, KCL dan NPK. Untuk komponen lain seperti pupuk daun, benih, pestisida dan perekat harga privat sama dengan harga sosialnya. Sedangkan pupuk TSP, harga privat lebih tinggi dari harga social.

Tingginya harga privat dibanding harga sosial pada input *tradeable* seperti pupuk Urea, ZA, KCL dan NPK disebabkan karena pada saat penelitian dilakukan harga pupuk aktual masih merupakan harga pupuk tidak bersubsidi. Menyikapi hal tersebut pemerintah mulai tahun 2004 memberlakukan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 107/Kpts/SR. 120/2/2004 tentang harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Dimana dengan adanya subsidi pupuk harga eceran tertinggi (HET) lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Koefisien Proteksi Efektif (EPC) merupakan indikator untuk mengetahui pengaruh proteksi pada input dan output serta menyatakan tingkat proteksi yang pada usahatani cabai besar. Dari tabel di atas diketahui nilai EPC sebesar 1,01%. Nilai EPC > 1 mempunyai arti bahwa secara umum petani diuntungkan dengan adanya intervensi pemerintah, karena dengan intervensi pemerintah menyebabkan nilai tambah harga

domestik lebih tinggi dibandingkan nilai tambah pada *border price*.

Transfer bersih (*net policy transfer*) merupakan selisih antara keuntungan individual dengan keuntungan sosial. Nilai transfer bersih pada usahatani cabai besar di Desa Sukoanyar negatif yaitu sebesar Rp. -96.573,5 per hektar, karena pendapatan privat lebih kecil daripada pendapatan sosial. Sedangkan pada usaha tani cabai besar di Desa Bocek nilai transfer bersih sebesar Rp929.843,67 per hektar, menggambarkan petani memperoleh surplus positif sebesar 929.843,67 dengan adanya intervensi pemerintah.

Koefisien keuntungan (PC) juga merupakan indikator untuk melihat transfer bersih yang diterima petani dan konsumen. Nilai PC pada usahatani cabai besar di Desa Sukoanyar sebesar 0,93% menunjukkan bahwa konsumen lebih diuntungkan dengan adanya intervensi pemerintah, sedangkan nilai PC pada usahatani cabai besar di Desa Bocek sebesar 1,03% menunjukkan keuntungan individual yang diterima petani lebih besar dari keuntungan sosial yang diterima konsumen.

Indikator rasio subsidi bagi produsen (SRP) digunakan untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah terhadap biaya produksi usahatani cabai besar. Nilai SRP usahatani cabai besar di Kabupaten Malang sama dengan atau mendekati nol menunjukkan pemerintah tidak memberikan subsidi secara langsung pada biaya usahatani cabai besar.

Kesimpulan

1. Pendapatan finansial usahatani cabai besar di Kabupaten Malang bernilai positif (> 0), mempunyai arti bahwa usaha tani cabai besar memberikan keuntungan finansial kepada petani. Demikian halnya dengan pendapatan ekonomi usahatani cabai besar di Kabupaten Malang bernilai positif (> 0), mempunyai arti bahwa usaha tani cabai besar memberikan keuntungan ekonomi kepada petani.
2. Kebijakan pemerintah terhadap komoditas cabai besar dapat berupa kebijakan terhadap output maupun input. Berdasarkan indikator NPCO, pemerintah melakukan transfer output kepada petani, dari indikator NPCI, pemerintah melakukan proteksi terhadap produsen input *tradeable*, dari indikator EPC, mempunyai arti bahwa,

secara umum petani diuntungkan dengan intervensi pemerintah, dari indikator SRP atau rasio subsidi bagi produsen, menunjukkan kebijakan pemerintah tidak berdampak secara langsung pada biaya usaha tani cabai besar.

Daftar Pustaka

- Anindita, R. 2004. *Pemasaran Hasil Pertanian*, Papyrus. Surabaya.
- Assaad F. 2000. *Analisis Keunggulan Komparatif Komoditas Kakao dan Kopi di Sulawesi Selatan*, Tesis Pascasarjana Universitas Brawijaya. Malang.
- Kadariah. 1998. *Evaluasai Proyek Analisa Ekonomis*, Lembaga Penerbrt Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mohantay, *et.al.* 2002. Assending the Competitiveness of Indian Cutton Production: A Policy Analysis Matrix Approach, *Working Paper 02-WP 301*; May 2002. Center for Agricultural and Rural Development. Iowa Sate University.
- Nopirin. 1992. *Ekonomi Intemasional*, cetakan ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- Nurmalinda, dkk. 1994. Evaluasi Usahatani Cabai Merah di Rembang. *Buletin PeneHtian Hortikultura Vol. XXVI No. 4*. Balai PeneHtian Hortikultura Lembang, Bandung.
- Pearson, S.R. and Monke, E.A. 1989. *The Policy Analysis Matrix for Agriculture Development*, Cornell University Press. Ithaca and London.
- Setiadi. 1999. *Pemasaran Cabai*, Adi Santika. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Tsakok, I. 1990. *Agricultural Price Policy, A Practitioners Guide to Partial-Equilibrium Analysis*, Cornell University Press. Ithaca and London.